

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil dengan legitimasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pemilu, tidak terlepas dari keikutsertaan partai politik sebagai sarana demokrasi yang bisa berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Untuk menciptakan pemerintahan yang mayoritas maka diperlukan partai-partai yang dapat digunakan sebagai kendaraan politik untuk ikut dalam pemilihan umum. Melalui partai politik rakyat berhak menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin yang menentukan kebijakan umum.

Pemilihan umum serentak 2024 dengan sistem proposional daftar terbuka telah menyebabkan persaingan yang ketat diantara caleg dalam memperebutkan suara. Guna memenangkan kompetisi di ajang pemilu, para kandidat di satu partai (caleg) saling bersaing satu sama lain dengan menerapkan berbagai strategi, taktik, dan metode kemenangan politik yang jitu. Begitu pentingnya strategi sehingga setiap kandidat mau tidak mau harus mampu bersaing menyusun sebuah strategi politik yang mampu memberikan kemenangan. Tanpa strategi, kekuasaan yang merupakan tujuan tidak akan pernah terwujud.

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dalam negara demokratis, kehadiran partai politik menjadi suatu keniscayaan, sebab partai politik memiliki peran penting dalam menumbuhkan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk bangsa dan negara yang padu (H.Cecep Suryana dkk. 2022:6). Maka dari itu, partai politik dianggap sebagai perwujudan negara demokratis yang modern untuk menjembatani kepentingan antara rakyat dan pemerintah (Ramlan Surbakti 2007:115).

Menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 1 tentang partai politik, definisi partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Reformasi pasca Orde Baru telah menghidupkan kembali demokrasi di Indonesia. Pertumbuhan partai politik pada masa ini tidak terhindarkan lagi sebab partai politik merupakan pilar dari demokrasi yang harus ada di dalam suatu Negara moderen. Masyarakat memiliki banyak pilihan untuk memperjuangkan keinginan sosial mereka. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah dan damai. Menjelang pemilu tahun 2024, percaturan politik Indonesia kembali diramaikan dengan kehadiran Partai Baru peserta Pemilu tahun 2024 yaitu Partai NasDem.

Partai politik yang merupakan pilar utama dalam negara demokrasi dengan fungsi-fungsi yang dimilikinya sejauh ini belum tergantikan oleh institusi lainnya. Salah satu fungsinya adalah dengan melakukan rekrutmen politik yang digunakan sebagai wadah untuk mengisi jabatan politik dan menyediakan kader-kader yang berkualitas untuk dapat dicalonkan pada pemilihan legislatif dan juga kepada daerah. Untuk mencapai tujuan jangka panjang, suatu partai politik harus memiliki strategi yang efektif agar eksistensinya bisa bertahan lama. Partai politik harus secara konsisten mengaitkan dan menerjemahkan ideologi politiknya dalam pesan dan isu politik yang dapat dengan mudah dipahami masyarakat sekaligus menyentuh permasalahan publik.

Partai Nasdem di deklarasikan pada tanggal 26 Juli 2011 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Berdirinya Partai NasDem tidak bisa dilepaskan dengan kemunculan Ormas Nasional Demokrat yang menjadi cikal bakal berdirinya Partai NasDem. Partai NasDem dengan Ormas Nasional Demokrat, kemudian ditambah dengan duduknya Surya Paloh yang merupakan salah satu Pendiri Ormas Nasional Demokrat sebagai Ketua Umum Partai NasDem. Untuk mencapai tujuan jangka panjang, suatu partai politik harus memiliki strategi yang efektif agar eksistensinya bisa bertahan lama. Partai politik harus secara konsisten mengaitkan dan menerjemahkan ideologi politiknya dalam pesan dan isu politik yang dapat dengan mudah dipahami masyarakat sekaligus menyentuh permasalahan publik.

Sebagai partai baru, partai NasDem pasti akan sangat gencar mencari massa pendukung agar perolehan suaranya dalam pemilu 2024 tidak kalah dengan partai lama yang telah memiliki segmen pemilih sendiri. Kabupaten Pinrang sendiri merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki karakteristik wilayah dengan kemajemukan penduduknya yang beragam di tiap daerah.

Meskipun di beberapa daerah merupakan basis massa partai-partai lama, namun kehadiran partai baru cukup potensial di Kabupaten ini. Kepadatan jumlah penduduk Kabupaten Pinrang membuat banyaknya pemilih “mengambang” yang bisa dijadikan sasaran bagi partai baru seperti Partai NasDem untuk mendulang suara pada Pemilu 2024. Dengan perolehan suara, sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Hasil Pemilu Periode 2019 dan 2024 Kab.Pinrang

NO.	PARTAI	JUMLAH SUARA 2019	JUMLAH KURSI 2019	JUMLAH SUARA 2024	JUMLAH KURSI 2024
1.	KEBANGKITAN BANGSA	21.184	5	25.860	5
2.	GERAKAN INDONESIA RAYA	16.494	2	30.174	6
3.	DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	18.229	5	12.652	2

4.	GOLONGAN KARYA	23.425	5	39.555	6
5.	NASDEM	20.437	4	64.705	11
6.	KEADILAN SEJAHTERA	3.382	0	3.924	0
7.	PERSATUAN INDONESIA	11.383	1	1.832	0
8.	PERSATUAN PEMBANGUNAN	19.560	4	11.937	3
9.	SOLIDARITAS INDONESIA	7.965	0	70	0
10.	AMANAT NASIONAL	16.136	2	6.149	1
11.	DEMOKRAT	38.183	8	21.141	3

SUMBER : KPU KAB.PINRANG

Sebagai perbandingan, dari tabel di atas ada beberapa partai yang mengalami penurunan drastis dari perolehan suara pada periode 2019 dan 2024. Diantaranya adalah Partai PDIP pada periode 2019 meraih suara sebanyak 18.229 dan mendapat 5 kursi, dan mengalami penurunan pada periode 2024 dengan meraih suara 12.652 dan mendapat 2 kursi. Adapula Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada periode 2019 meraih suara sebanyak 19.560 dan mendapat 4 kursi, dan mengalami penurunan pada periode 2024 dengan meraih suara 11.937 dan mendapat 3 kursi.

Selain itu, Partai Amanat Nasional (PAN) pada periode 2019 meraih suara sebanyak 16.136 dan mendapat 2 kursi, dan mengalami penurunan pada periode 2024 dengan meraih suara 6.149 dan mendapat 1 kursi. Adapun Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada periode 2019 meraih suara sebanyak 11.383 dan mendapat 1 kursi, sehingga pada periode 2024 mengalami penurunan dengan meraih suara sebanyak 1.832 dan tidak mendapatkan kursi. Dan yang paling signifikan perubahannya adalah Partai Demokrat pada periode 2019 meraih suara sebanyak 38.183 dan mendapat kursi, sedangkan periode 2024 mengalami penurunan drastis dengan meraih suara sebanyak 21.141 dan mendapat 3 kursi.

Sedangkan Partai yang mengalami peningkatan perolehan suara pada periode 2019 dan 2024. Diantaranya adalah Partai Gerindra pada periode 2019 meraih suara sebanyak 16.494 dan mendapat 2 kursi, sehingga pada periode 2024 mengalami peningkatan dengan meraih suara sebanyak 30.174 dan mendapat 6 kursi. Adapun Partai Golkar pada periode 2019 meraih suara sebanyak 23.425 dan mendapat 5 kursi, sehingga pada periode 2024 mengalami peningkatan dengan meraih suara sebanyak 39.555 dan mendapat 6 kursi.

Dan yang paling signifikan perubahannya adalah Partai NasDem pada periode 2019 meraih suara 20.437 dan mendapat 4 kursi, sehingga pada periode 2024 mengalami peningkatan drastis dengan meraih suara sebanyak 64.705 dan mendapat 11 kursi. Sehingga mampu merebut posisi Ketua DPRD Kab.Pinrang dan mampu mengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati pada PILKADA serentak 2024 tanpa koalisi.

Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk meneliti Strategi apa yang digunakan oleh Partai Nasdem pada Pemilu 2024 di Kab.Pinrang sehingga dapat memperoleh suara yang sangat tinggi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus penelitian:

1. Bagaimana strategi Partai Nasdem dalam memenangkan Pemilu 2024 di Kabupaten Pinrang

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apa strategi Partai NasDem dalam memenangkan Pemilu 2024 di Kabupaten Pinrang

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademis
 - a. Menjadi rujukan literatur bagi penelitian yang akan datang pada bidang strategi partai politik di tingkat lokal maupun nasional.
 - b. Memperkaya kajian ilmu politik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang strategi politik yang mengkaji bagaimana faktor ketokohan pemimpin dalam sebuah partai mampu meningkatkan hasil elektoral pemilu.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi khalayak publik dan memperkaya pengetahuan mengenai strategi politik.
 - b. Menjadi rujukan bagi mereka yang tertarik mengkaji strategi sebuah partai politik yang menjadikan aspek ketokohan figur pemimpin menjadi daya tarik mendapatkan suara pemilih dalam pemilu.
 - c. Menjadi acuan keputusan bagi partai politik dalam menentukan strategi politiknya menghadapi pemilu guna meningkatkan perolehan suara dan kursi di lembaga perwakilan rakyat.

- d. Bagi penulis sendiri, hasil penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana.

1.5. Peneliti Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:

Penelitian yang dilakukan Budi Raharjo dari Universitas Gadjah Mada yang berjudul "*Strategi Pemenangan Partai Politik: Studi tentang Strategi Pemenangan Partai Nasdem pada Pemilu 2014 di Indonesia*" (Raharjo, 2015) berfokus pada bagaimana partai politik baru dapat lolos dalam administrasi KEMENHUKHAM sebagai peserta pemilu 2014. Sedangkan penelitian ini difokuskan kepada kemenangan pemilu di level Kabupaten, khususnya Kabupaten Pinrang.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfania Laela Azzahra dari Universitas Hasanuddin yang berjudul "*Strategi Partai Nasdem dalam Meningkatkan Perolehan Kursi di DPRD Kab.Luwu Utara pada PILEG 2019*" Penelitian menggunakan metode kualitatif. Persamaan pada peneliti sebelumnya adalah sama-sama Meneliti Strategi politik Memenangkan suatu kompetisi politik. Perbedaan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan, yaitu strategi offensive dan defenseve sedangkan peneliti ini tidak hanya menggunakan teori strategi, tetapi juga melihat dari sistem pelemagaan partai dengan menggunakan teori institusionalisasi partai.

Penelitian yang dilakukan Anbeja Kirsy (ANBEJA, 2015) yang berjudul "*Strategi Pemenangan Pemilu Legislatif Provinsi Lampung Tahun 2014 (Studi pada DPW Partai NasDem Provinsi Lampung)*" penelitian tersebut berfokus kepada strategi penokohan pemuda, glorifikasi masa lalu. Sedangkan penelitian ini tidak dibatasi hanya untuk memenangkan calon pemuda saja, melainkan seluruh calon yang berada di dalam dukungan partai NasDem.

1.6. Pengertian Partai Politik

Pengertian dari partai politik adalah suatu organisasi yang berorientasi kepada pencapaian legitimasi kekuasaan atas pemerintahan melalui proses pemilu. Syaibani mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang mempersatukan dan dimotivasi oleh ideologi tertentu serta berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilu (Sulistyowati, 2006:349). Penelitian tentang partai politik merupakan kegiatan ilmiah yang relatif baru, namun telah bermacam-macam penelitian telah dilakukan untuk mempelajari.

Dari penelitian-penelitian tersebut, telah banyak definisi tentang partai politik dari pakar-pakar politik. Salah satunya menurut Miriam Budiardjo: "Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk

melaksanakan kebijaksanaan- kebijaksanaan mereka” (Budiardjo, 2008:403).

Demikian juga yang dikatakan oleh Rahman (2002), mengasosiasikan partai politik sebagai organisasi perjuangan, tempat seseorang atau kelompok mencari dan memperjuangkan kedudukan politik dalam Negara. Bentuk perjuangan yang dilakukan oleh setiap partai politik tidak harus menggunakan kekerasan atau kekuatan fisik, tetapi melalui berbagai konflik dan persaingan baik internal partai maupun antar partai yang terjadi secara melembaga dalam partai politik pada umumnya. Sedangkan dalam Undang- Undang No. 31 tahun 2002 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

Sedangkan Inu Kencana dkk, mendefinisikan partai politik sebagai kelompok orang-orang yang memiliki ideologi yang sama, berniat merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran dalam suatu level negara (Kencana dkk, 2002:58).

Neuman seperti yang dikutip oleh Budiardjo dalam bukunya “Partisipasi Politik dan Partai Politik”, mengemukakan definisi partai politik sebagai berikut : “Partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda.

Dengan demikian, partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuasaan-kekuasaan dan ideologi sosial dengan lembaga aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas” (Budiardjo, 1998:16-17). Dari beberapa pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa partai politik adalah suatu organisasi terorganisir yang berusaha menghimpun kekuasaan dan kekuatan untuk menarik dukungan rakyat dan berusaha menempatkan anggota- anggotanya untuk menjadi wakil partainya dalam mengendalikan kekuasaan dan pemerintahan melalui pemilihan umum.

1.7. Strategi Politik

Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita- cita politik (Schroder, 2003:5). Menurut Clausewit (dalam Nursal, 2004:55) strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Dalam abad modern, penggunaan istilah strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas hampir dalam semua bidang ilmu. Dalam pengetahuan umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Sehingga, strategi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan-tujuan politik.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi politik adalah sebuah rencana yang sistematis dan mengimplementasikannya dalam mencapai tujuan memenangkan kekuasaan dalam bidang politik. Dengan strategi politik inilah partai politik mampu

memenangkan perebutan kekuasaan dalam setiap momentum. Untuk mencapai kemenangan tersebut, terdapat beberapa strategi yang harus dilakukan oleh partai politik atau kandidat. Menurut Newman dan Sheth (dalam Nursal, 2004:159), beberapa strategi yang harus dilakukan adalah :

1. Strategi Offensive (menyerang). Pada dasarnya strategi ofensif diterapkan pada saat kampanye pemilu harus menampilkan perbedaan yang jelas antara partai atau kandidat yang satu dengan partai atau kandidat pesaing-pesaing yang menjadi target untuk diambil pemilihnya. Dalam strategi ofensif yang harus ditampilkan adalah perbedaan keadaan saat berlaku dan keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh. Strategi ofensif terdiri dari dua, yaitu strategi perluasan pasar dan strategi menembus pasar.
2. Strategi defensive (bertahan). Strategi defensif akan muncul ke permukaan, misalnya apabila partai pemerintah atau sebuah koalisi pemerintahan yang terdiri atas beberapa partai ingin mempertahankan mayoritasnya atau apabila pasar ingin dipertahankan. Selain itu strategi defensif juga dapat muncul apabila sebuah pasar tidak akan dipertahankan lebih lanjut atau ingin ditutup, dan penutupan pasar ini diharapkan membawa keuntungan sebanyak mungkin.

Strategi ini diterapkan kepada para pemilih yang telah memilih kontestan dengan citra tertentu yang dianggap tidak cocok oleh pemilih dan kemudian kontestan tersebut tidak menghasilkan kinerja yang memuaskan pemilih. Bisa saja pada suatu pemilu, sebagian pemilih menjatuhkan pilihannya kepada kandidat yang jelek, tetapi ternyata kandidat tersebut tidak menghasilkan kinerja yang diharapkan.

1.8. Prinsip-Prinsip Dasar Pemusunan Strategi

Dalam karyanya tentang perumusan strategi, Sun Tzu menjelaskan bahwa pemilihan strategi harus berlandaskan pada prioritas-prioritas tertentu. 184 Sun Tzu: "Bentuk yang tertinggi dari kepemimpinan adalah menyerang strategi musuh; yang terbaik kedua adalah mengacaukan persekutuanannya; yang terbaik berikutnya adalah menyerang tentara musuh; dan kebijakan yang paling buruk adalah mengepung kota-kota berbenteng." Lakukan yang terakhir ini hanya jika tidak ada pilihan lain.

Untuk dapat menyerang strategi lawan, penting untuk mengenalinya terlebih dahulu strategi mereka. Oleh karena itu, memperoleh informasi dari pihak lawan menjadi sangat penting pula bagi kita. Jika tidak, bagaimana mungkin kita akan dapat mengetahui rencana-rencana mereka. Menyerang strategi lawan berarti mengganggu langkah-langkah pelaksanaan strategi mereka secara terus-menerus, sehingga mereka tidak dapat merealisasikan rencana-rencananya. Dalam sepak bola, cara ini dikenal dengan istilah gangguan dini yang menyebabkan pola permainan lawan tidak dapat dibangun. Jika tidak ada informasi yang tersedia mengenai strategi lawan, atau informasi yang ada sangat tidak menyakinkan, maka aliansi lawan harus dihancurkan atau setidaknya diganggu.

Apabila lawan memiliki hubungan yang baik dan berpengaruh dengan kelompok-kelompok masyarakat (misalnya serikat buruh, gereja, asosiasi industri, tentara, partai-partai lain, dsb.) maka ikatan-ikatan ini harus diputus atau direnggangkan. Hal yang dapat dilakukan adalah, antara lain, dengan membuat tawaran yang menarik atau dengan merusak kredibilitas lawan, atau merusak kepercayaan aliansi mereka terhadap lawan.

Pertarungan politis (isu, pribadi, dsb.) sebaiknya hanya dilakukan jika langkah-langkah lain tidak lagi efektif (seperti misalnya, strategi maupun aliansi mereka tidak dapat diserang). Isu-isu yang dipilih pun sebaiknya adalah isu yang membawa keuntungan, atau isu yang diabaikan lawan. Pilihan terburuk adalah menduduki daerah kekuatan lawan. Dengan demikian, isu yang diserang janganlah isu yang menjadi kekuatan lawan

1.9. Institusionalisasi Partai

Institusionalisasi partai adalah proses dimana partai politik mengorganisasikan diri untuk mencapai nilai dan stabilitas tertentu. Menurut Huntington, ini melibatkan pengembangan pada perilaku dan sikap yang terintegrasi dalam budaya partai. Proses ini penting untuk meningkatkan kinerja organisasi partai, terutama dalam konteks demokrasi, dimana partai berfungsi sebagai sarana partisipasi politik. Di Indonesia, institusionalisasi partai yang baik diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan mendukung transisi menuju demokrasi yang lebih stabil.

Angelo Panebianco adalah seorang ilmuwan politik yang dikenal karena karya-karyanya dalam studi partai politik dan organisasi politik. Salah satu kontribusinya yang penting adalah pengembangan konsep tentang partai politik sebagai organisasi yang memiliki kekuatan dan struktur khusus dalam sistem politik modern. Panebianco mengkaji partai politik dengan pendekatan yang menekankan pada organisasi internal partai dan kekuasaan yang dimilikinya dalam rangka memenangkan pemilihan dan pengelolaan kekuasaan politik. Ia juga dikenal dengan konsep partai profesional elektoral yang mendefinisikan partai politik berdasarkan aspek organisasi dan profesionalisme dalam menghadapi kompetisi politik. Panebianco, yang ditulis kemudian, hanya berfokus pada partai politik, dan khususnya pada partai-partai di negara demokrasi yang sudah mapan.

Dengan 'institusionalisasi', ia memahami 'cara organisasi "memantapkan"', yang kemudian ia sebut sebagai proses di mana organisasi 'perlahan-lahan kehilangan karakternya sebagai alat: organisasi menjadi berharga dalam dirinya sendiri, dan tujuannya menjadi tidak dapat dipisahkan. dan tidak dapat dibedakan darinya. Dengan cara ini, pelestarian dan kelangsungan hidup menjadi "tujuan" bagi banyak pendukungnya (1988: 49, 53). Agar hal ini dapat terwujud, sistem insentif internal yang tepat perlu dikembangkan yang memberikan insentif selektif bagi mereka yang berkepentingan dengan kepemimpinan dan insentif yang lebih kolektif yang menumbuhkan loyalitas yang tersebar terhadap partai.

Untuk mengukur *derajat* dalam pelebagaan partai, Panebianco memilih dua kriteria: tingkat *otonomi* vis à vis lingkungannya dan tingkat internalnya '*kesisteman*' atau saling ketergantungan antar sektor. Sekali lagi ia menyadari bahwa otonomi dan sistemitas dalam praktiknya akan saling berkaitan. Terdapat banyak tumpang tindih dalam kriteria pelebagaan yang disebutkan oleh para penulis keduanya mencakup otonomi, dan gagasan Panebianco tentang sistemitas tampaknya mencakup kombinasi kompleksitas dan koherensi Huntington. Yang tidak dibutuhkan Panebianco adalah kemampuan beradaptasi. Faktanya, ia berpendapat bahwa tingkat pelebagaan yang tinggi justru dapat menghambat fleksibilitas atau kemampuan beradaptasi.

Levitsky (1998) menunjukkan bahwa kedua penjelasan mengenai pelebagaan ini mempunyai kesamaan lain. Ada semacam keterputusan antara konsep awal pelebagaan dan cara penjabarannya serta dikaitkan dengan kriteria tertentu. Konsepsi awal menekankan apa yang disebut Levitsky, mengikuti Selznick (1957), sebagai 'pemasukan nilai'. Hal ini terjadi ketika sebuah organisasi menjadi 'diberikan nilai melebihi persyaratan teknisnya tugas di tangan'. Jadi Huntington berbicara tentang cara sebuah organisasi 'mengembangkan kehidupannya sendiri terlepas dari fungsi-fungsi spesifik yang dijalankannya' dan Panebianco juga berbicara tentang bagaimana organisasi 'menjadi berharga dalam dirinya sendiri'.

Namun ketika membahas mengenai penjabaran istilah tersebut, spesifikasinya, khususnya dalam kasus Panebianco, terutama berkaitan dengan elaborasi organisasi dan rutinisasi dalam pengertian perilaku yang sempit. Levitsky (1998) berpendapat perlunya membedakan kedua aspek ini, atau yang kita sebut sebagai 'sumber kohesi'. Ia mengutip kasus Partai Peronis di Argentina (Partido Justicialista, PJ) yang menurut pendapatnya mempunyai nilai tinggi dalam hal pemberian nilai, namun aturan dan prosedurnya dielakkan, dimanipulasi, dan diperebutkan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua dimensi tersebut tidak serta merta berjalan bersamaan: partai-partai bisa jadi tinggi, atau rendah, dalam kedua dimensi tersebut, namun bisa juga ada partai-partai yang, seperti PJ, kuat dalam pemasukan nilai namun rendah dalam rutinitas organisasi (dan mungkin sebaliknya, sebagai contoh Levitsky menawarkan beberapa partai Hijau Eropa).

Vicky Randall dan Lars Svason menyebutkan bahwa pelebagaan partai politik melibatkan setidaknya empat variabel penting, yaitu : *systemness* (kesistemannya), *decisional autonomy* (otonomi keputusan), *value infusion* (nilai pemasukan) dan *reification*. Proses pelebagaan ini mengandung dua aspek yaitu aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Apabila kedua aspek ini dipersilangkan maka akan dihasilkan sebuah tabel empat sel, yaitu: (1) derajat kesisteman (*systemnes*) sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural. (2) derajat identitas nilai (*value infusion*) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural. (3) derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dan struktural. (4) derajat pengetahuan atau citra publik (*reification*) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan kultural.

1. Derajat kesisteman (*systemnes*).

Kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur,

dan mekanisrne yang disepakati dan ditetapkan dalam AD/ART partai politik. Derajat kesisteman suatu partai bervariasi menurut: (a) asal-usul partai politik, yaitu apakah dibentuk dari atas, dari bawah, atau dari atas yang disambut dari bawah; (b) siapakah yang lebih menentukan dalam partai: seorang pemimpin partai yang disegani ataukah pelaksanaan kedaulatan anggota menurut prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh organisasi sebagai suatu kesatuan; (c) siapakah yang menentukan dalam pembuatan keputusan: faksi-faksi dalam partai ataukah partai secara keseluruhan; dan (d) bagaimana partai memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisan, yaitu apakah dengan klientelisme (pertukaran dukungan dengan pemberian materi) ataukah menurut konstitusi partai (AD/ART).

Titik terlemah partai politik di Indonesia adalah belum ada kesisteman dalam suatu partai. Kebanyakan partai politik, termasuk partai politik yang telah memenuhi ketentuan *electoral threshold*, memiliki derajat kesisteman yang rendah karena keempat indikator tersebut, tetapi terutama karena peran pemimpin partai lebih dominan daripada kedaulatan anggota dan kepentingan faksi, kelompok dan golongan lebih dominan daripada kepentingan partai sebagai organisasi.

Pemimpin yang dominan dalam suatu partai politik tidaklah dengan sendirinya buruk. Peran pemimpin dominan akan menimbulkan akibat buruk apabila sang pemimpin menggunakan kharismanya untuk melanggengkan dominasinya, sedangkan peran dominan pemimpin akan menimbulkan akibat yang positif bila sang pemimpin menggunakan kharismanya membangun kesisteman dalam partai. Faksi, dan pengelompokan di dalam partai juga tidak dengan sendirinya buruk. Bila pengelompokan di dalam partai terbentuk atas dasar primordial, maka pengelompokan akan merusak solidaritas partai karena akan menimbulkan konflik *zero-sum* (yang menang mendapatkan semuanya, yang kalah tidak mendapatkan apa-apa). Akan tetapi bila pengelompokan berdasarkan perbedaan orientasi (pola dan arah) kebijakan, maka pengelompokan itu justru akan mendinamiskan partai karena konflik yang timbul justru *non zero sum* (menang-menang alias semua kelompok menang).

Untuk membangun kesisteman dalam setiap partai politik dapat ditempuh dengan 'pasal' (undang-undang) tetapi dapat pula ditempuh dengan 'pasar' (diserahkan pada penilaian warga masyarakat). Dalam rangka membangun kesisteman ini, pada UU Partai Politik perlu dimuat ketentuan yang mengharuskan setiap partai politik merumuskan AD/ART secara mendetail, dan ketentuan yang memuat jenis keputusan perihal apa saja yang harus diputuskan melalui rapat anggota.

Setidak-tidaknya tiga isu harus diputuskan melalui mekanisme rapat anggota sesuai dengan tingkatannya, yaitu (a) penentuan pengurus partai politik pada semua tingkatan, (b) penentuan calon partai politik untuk jabatan legislatif (DPR dan DPRD), eksekutif (Presiden/Wakil Presiden Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan jabatan publik lainnya, dan (c) penentuan kebijakan partai politik mengenai peraturan perundang-undangan, dan kebijakan publik pada umumnya.

Setiap partai politik harus berangkat dari kerangka berpikir bahwa konflik niscaya akan terjadi dalam partai politik, setidaknya-tidaknya dalam ketiga isu yang

disebutkan di atas. Karena itu partai politik seharusnya memang merupakan wadah konflik atau wadah mengatur dan menyelesaikan konflik setidaknya dalam ketiga isu tersebut. Bila mencermati peran eksternal partai politik, maka dapat disimpulkan bahwa partai politik juga merupakan peserta konflik dalam pemilihan umum dan dalam pembuatan keputusan di lembaga legislatif. Bahkan dari fungsinya, partai politik berfungsi menampung dan mengagregasikan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi suatu alternatif kebijakan publik. Dengan melaksanakan fungsi Derajat agregasi kepentingan ini, partai politik berarti juga berperan sebagai pihak yang menyelesaikan konflik.

2. Identitas Nilai (*Value Infution*).

Identitas nilai ini berkaitan dengan identitas partai politik berdasarkan ideologi atau platform partai, dan karena itu berdasarkan basis sosial pendukungnya, dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan yang diperjuangkan partai politik tersebut. Karena itu derajat identitas nilai suatu partai politik berkaitan dengan (a) hubungan partai dengan kelompok populis tertentu (*popular bases*), yaitu apakah suatu partai politik mengandung dimensi sebagai gerakan sosial yang didukung oleh kelompok populis tertentu, seperti buruh, petani, kalangan masyarakat tertentu, komunitas agama tertentu, komunitas kelompok etnik tertentu, dan (b) pengaruh klientelisme dalam organisasi, yaitu apakah hubungan partai dengan anggota cenderung bersifat instrumental (anggota selalu mengharapkan *tangible resources* berupa materi dari partai) ataukah lebih bersifat ideologis (anggota mengenal dan mengharapkan partai bertindak berdasarkan identifikasi terhadap ideologi partai). Partai politik yang mempunyai basis sosial pendukung yang spesifik niscaya akan memiliki identitas nilai yang jelas. Partai buruh sesuai dengan namanya jelas memiliki basis sosial pendukung yang jelas buruh karena pola dan arah perjuangan partai itu memperhatikan kepentingan buruh, dan Partai Republik di Amerika Serikat memiliki basis sosial pendukung yang jelas, yaitu kulit putih menengah ke atas beragama Protestan.

3. Derajat Otonomi Keputusan (*Desicional autonomy*)

Mengacu pada ketergantungan partai pada aktor-aktor eksternal (Randall & Svasand, 2002). Aktor-aktor tersebut ialah otoritas tertentu (penguasa), sumber dana (pengusaha atau lembaga luar) dan sumber dukungan massa. Hal yang terpenting dari dimensi ini adalah: pertama, apakah partai tergantung kepada aktor luar tersebut atau hubungan itu bersifat independen. Kedua, apakah keputusan partai ditentukan oleh aktor luar atau hubungan itu berupa jaringan yang memberi dukungan kepada partai. Ketergantungan partai terhadap aktor eksternal akan memberikan dampak bagi partai itu sendiri.

Kehadiran para aktor luar cenderung menyebabkan pelembagaan partai menjadi lemah karena sumber dukungan pimpinan dan obojek loyalitas dipengaruhi oleh pihak aktor tersebut. Dari sini bisa menjadi ukuran otonomi keputusan dimana suatu partai politik bisa disebut melembaga jika keputusannya tidak dipengaruhi

pihak luar (Randall & Svasand, 2002) 35 Meski didalam teori otonomi dan kesatuan adalah karakter yang terpisah, namun dalam prakteknya kedua unsur ini saling bergantung satu sama lain. Huntington (1983) menekankan pentingnya partai politik untuk memperkuat kelembagaan politik, karena partai politik mengorganisir partisipasi politik dan memperngaruhi batas-batas sampai mana partisipasi tersebut bisa diluaskan. Stabilitas, kekokohan, partai dan sistem kepartaian tergantung dengan cderajat pelembagaan partai politik.

4. Pengetahun Publik/Reifikasi

Reifikasi partai, mengacu pada sejauhmana suatu partai politik dipandang baik oleh masyarakat (Randaall dan Svasand 2002). Reifikasi berkaitan dengan bagaimana partai mampu menjelma sebagai institusi yang memiliki nilai positif dan membawa dampak positif kepada publik. Dalam mendapatkan suara banyak dari konstituen, reifikasi partai politik merujuk pada pertanyaan apakah keberadaan partai telah tertanam pada imajinasi publik maka pihak lain, baik individu atau lembaga. keduanya akan menyesuaikan aspirasi, harapan, sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan partai politik tersebut.

Reifikasi juga dapat dilihat dari umur partai politik. Semakin tua umur suatu partai politik makin jelas citra atau pengetahuan publik mengenai partai tersebut (Khikmawanto, 2021). Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi pengetahuan publik bila masyarakat umum mengetahui wajah dan kiprah partai politik itu sesuai identitas nilai (platform) partai itu sehingga masyarakat pun dapat memahami (meski belum tentu setuju) mengapa suatu partai politik melakukan tindakan tertentu dan tidak melakukan tindakan lain.

Salah satu masalah serius yang dihadapi partai-partai di Indonesia saat ini adalah tidak adanya institusionalisasi dalam tubuh partai secara menyeluruh. Partai seakan-akan hanya menjalankan aktivitasnya menjelang pemilu. Setelah itu, masyarakat tidak tahu apa yang dilakukan partai. Ketidakmampuan partai politik untuk mengimplementasikan segala peran dan fungsinya dalam realitas politik menjadi hal yang memperpanjang catatan buruk bagi partai politik itu sendiri.

Intitusionalisasi partai tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena terdapat kelemahankelemahan internal dan eksternal partai. Kemampuan eksternal dari partai pofitik yang belum berjalan fungsional secara baik, ditambah konflik internal organisasi yang semakin mengemuka sehingga menenggelamkan peran partai politik secara institusi. Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga kelemahan utama partai politik di Indonesia. Pertama, ideologi partai yang tidak operasional sehingga tidak saja sukar mengidentifikasi pola dan arah kebijakan publik, yang diperjuangkannya tetapi juga sukar membedakan partai yang satu dengan partai yang lain.

Kedua, secara internal, organisasi partai kurang dikelola secara demokratis, sehingga partai politik lebih sebagai organisasi pengurus yang bertikai dari pada organisme yang hidup sebagai organisasi anggota. Ketiga, secara eksternal 29 kurang memiliki pola pertanggungjawaban yang jelas terhadap public.

Secara umum, Panebianco berpendapat bahwa semakin besar unsur penetrasi, semakin kuat pula kemungkinan kelembagaan sebuah partai, tetapi pada saat yang sama, beberapa unsur dari keduanya juga diinginkan. Pertama-tama, pendekatan ini cenderung berasumsi bahwa partai muncul dan berkembang secara bertahap. Sebaliknya, di negara-negara Dunia Ketiga, biasanya dalam jangka panjang, proses perkembangan partai terganggu secara berskala. Dalam beberapa kasus, partai-partai dalam gelombang demokratisasi saat ini telah memiliki keunggulan di mana mereka dapat membangun fondasi kelembagaan yang telah diletakkan pada periode sebelumnya. Misalnya, Munck dan Bosworth (1998), yang berusaha menjelaskan mengapa partai-partai di Chili menonjol dalam hal pelembagaan, mengidentifikasi alasan utama keberadaan partai-partai yang dilembagakan sebelum kudeta 1973.

Isu yang berdampak besar terhadap kemungkinan konsolidasi struktural adalah ketersediaan sumber daya, terutama pendanaan. Partai-partai di Dunia Ketiga kemungkinan besar tidak akan mampu memperoleh pendapatan yang signifikan dari iuran keanggotaan. Berbeda dengan pengalaman sebelumnya di sejumlah negara Eropa Barat, perbedaan tingkat dan urutan perkembangan sosial, di satu sisi, dan dampak perubahan media komunikasi massa di sisi lain, cenderung membatasi kemungkinan partai dengan keanggotaan massa dalam konteks Dunia Ketiga. Di saat yang sama, mengingat situasi transisi demokrasi, meningkatnya biaya kampanye pemilu di banyak belahan dunia berarti bahwa partai-partai membutuhkan dana agar dapat bersaing secara efektif. Partai-partai berkuasa di Malaysia (UMNO – Organisasi Nasional Melayu Bersatu) dan Taiwan (KMT) – juga Golkar di Indonesia, tetapi hingga saat ini hanya terdapat sedikit kemungkinan untuk persaingan partai yang berarti di negara tersebut – menurut Sachsenroder (1998) termasuk yang terkaya di dunia. Mereka telah mampu membangun kerajaan bisnis mereka sendiri yang besar, sehingga memberikan mereka kemandirian finansial yang efektif. Sebaliknya, lawan-lawan mereka menghadapi kesulitan luar biasa dalam mengumpulkan dana yang diperlukan untuk membayar ruang kantor, staf, fasilitas komunikasi, dan semua persyaratan lain untuk kompetisi elektoral yang efektif.

Mengantisipasi bagian selanjutnya, hal ini secara kebetulan membantu menjelaskan mengapa politisi oposisi individu dengan sumber kekayaan pribadi yang substansial begitu sering memainkan peran dominan dalam pembentukan dan pengarahannya partai politik baru, baik di Asia Timur, Amerika Latin, atau bahkan sebagian Afrika Tropis. Partai Progresif Demokratik di Taiwan mungkin telah berhasil melawan tren ini. Sebelum disahkan pada tahun 1986, partai ini memiliki rekam jejak panjang dalam menentang KMT yang berkuasa dan dukungan rakyat.

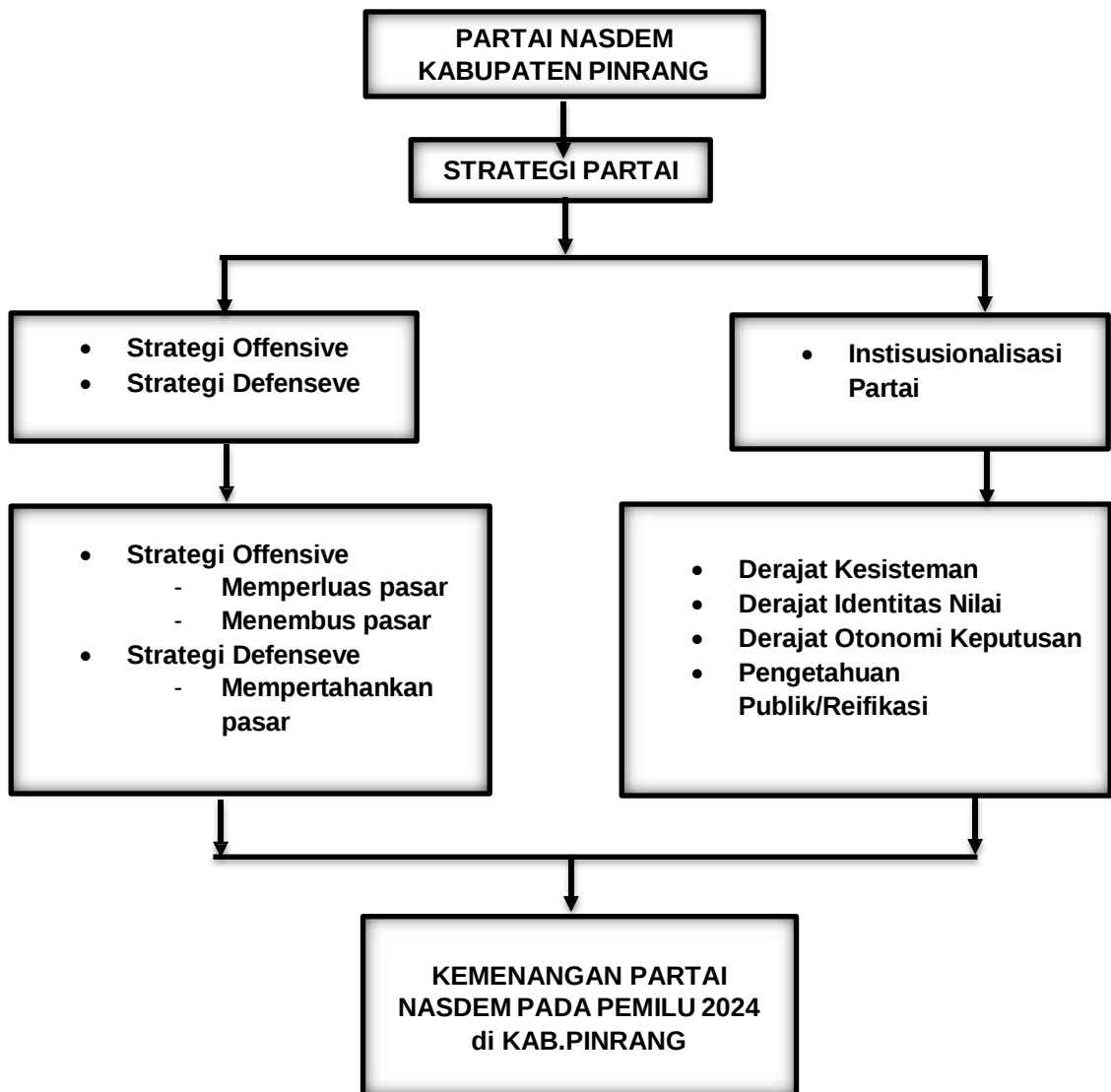
1.10. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir strategi partai politik umumnya berfokus pada bagaimana partai merumuskan dan melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan, khususnya Partai NasDem untuk memenangkan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Pinrang. Kerangka ini mencakup dua jenis strategi utama menurut Peter Schroder: strategu ofensif dan defensif

- Strategi ofensif adalah untuk memperluas dukungan pemilih dan meningkatkan kekuatan partai politik
- Strategi defensif adalah strategi untuk mempertahankan basis dukungan yang sudah dimiliki, menjaga citra partai, mengelola krisis, dan mengawasi serta mengendalikan wilayah pemilih

Kerangka berpikir tentang aspek institusionalisasi partai politik menyoroti proses penguatan struktur dan budaya partai agar terbentuk pola perilaku yang konsisten dan sikap budaya politik yang kokoh. Aspek ini mencakup dua dimensi utama yakni aspek struktural dan kultural, serta aspek internal dan eksternal partai. Empat dimensi institusionalisasi adalah: 1) systemness (derajat kesisteman partai yang meliputi fungsi dan mekanisme kerja sesuai aturan internal seperti AD/ART), 2) value infusion (identifikasi nilai dan komitmen anggota terhadap partai), 3) decisional autonomy (kemampuan pengambilan keputusan internal yang mandiri), dan 4) reification (eksistensi dan citra partai di mata publik). Ini menekankan pentingnya integritas internal, kaderisasi yang terstruktur, penguatan fungsi kelembagaan, dan pemeliharaan konsensus internal sebagai faktor utama dalam membangun institusionalisasi partai yang kuat untuk memperkuat demokrasi serta memastikan peran partai sebagai lembaga politik yang kredibel dan berkelanjutan. Dengan menggunakan teori diatas sehingga mampu mengetahui strategi kemenangan Partai Nasdem pada pemilu 2024 di Kabupaten Pinrang.

1.11. Skema Pikir



BAB II METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan aspek-aspek, prosedur, dan tahapan yang dilakukan dalam proses penelitian ini. Dalam bab ini penulis menguraikan tipe dan jenis penelitian, lokasi dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian, dan teknik analisis data.

2.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis strategi Pemenangan Partai NasDem pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pinrang. Metode kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat eksploratif dan interpretatif, yaitu untuk memahami secara mendalam fenomena sosial-politik dalam konteksnya yang alamiah (Creswell, 2014). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna, motivasi, dan dinamika di balik strategi politik yang diterapkan, melalui data deskriptif yang kaya dari wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen (Strauss & Corbin, 2007). Sementara itu, pendekatan studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada suatu fenomena kontemporer dalam batas-batas konteks yang jelas—yakni kinerja elektoral Partai NasDem di satu kabupaten tertentu (Yin, 2018). Studi kasus memfasilitasi penyelidikan mendalam dan holistik terhadap kasus tunggal yang dianggap unik dan strategis, sehingga memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang "bagaimana" dan "mengapa" strategi tersebut dirumuskan dan diimplementasikan dalam setting dunia nyata (Yin, 2018). Kombinasi metode kualitatif dan pendekatan studi kasus ini dinilai tepat karena mampu mengungkap kompleksitas proses politik, interaksi antaraktor, serta faktor kontekstual yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, sekaligus memberikan landasan empiris yang mendalam untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

2.2. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini menetapkan Kabupaten Pinrang sebagai lokasi penelitian berdasarkan tiga pertimbangan utama yang bersifat sistematis, substantif, dan metodologis. Pertama, dari aspek signifikansi empiris dan fenomena unik, Kabupaten Pinrang mencatat prestasi elektoral yang luar biasa bagi Partai NasDem dalam Pemilu 2024. Data menunjukkan peningkatan suara yang sangat tajam dari 20.437 suara (4 kursi) pada 2019 menjadi 64.705 suara (11 kursi) pada 2024 lonjakan terbesar di antara semua partai peserta pemilu di wilayah tersebut. Keberhasilan ini tidak hanya menjadikan NasDem sebagai partai dengan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Pinrang, tetapi juga memungkinkan partai tersebut merebut posisi ketua DPRD dan mengusung calon kepala daerah tanpa membangun koalisi sebuah pencapaian yang relatif jarang dalam politik praktis tingkat lokal. Fenomena ini menawarkan sebuah kasus

kritis (critical case) yang ideal untuk dikaji secara mendalam guna memahami mekanisme dan strategi di balik keberhasilan elektoral yang bersifat transformatif.

Kedua, dari sudut kelangkaan dan nilai akademis, keberhasilan NasDem di Pinrang menawarkan konteks yang kaya untuk menguji dan mengembangkan teori-teori strategi politik, mobilisasi pemilih, dan institusionalisasi partai di tingkat akar rumput. Kabupaten ini memiliki karakteristik sosial-politik yang kompleks: masyarakat yang majemuk, basis pemilih tradisional yang telah mapan, serta adanya sejumlah besar pemilih mengambang. Kemampuan NasDem untuk tidak hanya memasuki, tetapi juga mendominasi pasar politik di wilayah seperti ini menjadikan Pinrang sebagai laboratorium alami untuk mengeksplorasi efektivitas strategi ofensif, defensif, dan pelembagaan partai dalam setting kompetisi elektoral yang riil.

Ketiga, dari tinjauan praktis dan metodologis, pemilihan lokasi ini didukung oleh faktor aksesibilitas dan kedalaman data. Kedekatan geografis dan sosial peneliti dengan lokasi memungkinkan pengumpulan data primer yang kaya melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti pengurus partai, anggota legislatif terpilih, penyelenggara pemilu, dan masyarakat pemilih. Selain itu, kelengkapan data sekunder seperti dokumen resmi KPU, arsip media lokal, dan laporan hasil pemilu memungkinkan triangulasi data yang kuat, sehingga meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

Secara keseluruhan, pemilihan Kabupaten Pinrang didasarkan pada kombinasi keunikan fenomena, signifikansi teoritis, dan kelayakan metodologis. Lokasi ini dianggap mampu memberikan wawasan yang mendalam, kontekstual, dan bernilai tambah tinggi bagi perkembangan ilmu politik, khususnya dalam kajian strategi pemenangan partai politik di daerah.

2.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder, yang saling melengkapi untuk memastikan kedalaman dan keabsahan temuan.

1. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui teknik pengumpulan data kualitatif, khususnya wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan informan kunci yang dipilih secara purposif. Informan tersebut meliputi pengurus Partai NasDem tingkat daerah (misalnya Sekretaris DPD), anggota DPRD Kabupaten Pinrang dari Partai NasDem, Ketua KPU Kabupaten Pinrang, aktivis sayap partai (Tim NasDem Milenial), serta masyarakat pemilih di wilayah tersebut. Data primer ini bersifat subjektif-empiris dan sangat bernuansa kontekstual, sehingga cocok untuk menggali persepsi, motivasi, pengalaman, dan penjelasan mendalam terkait strategi yang diterapkan partai.
2. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis dan dokumen resmi yang relevan. Data ini meliputi dokumen administratif dan elektoral seperti hasil rekapitulasi suara pemilu dari KPU Kabupaten Pinrang, daftar calon tetap (DCT), serta profil daerah pemilihan (Dapil). Selain itu, peneliti juga mengumpulkan

dokumen internal partai seperti AD/ART, visi-misi, dan materi kampanye, serta publikasi media (berita lokal, siaran pers, dan konten media sosial partai) yang merekam aktivitas dan narasi politik Partai NasDem di Pinrang. Data sekunder berfungsi sebagai bahan pembandingan dan konfirmasi terhadap data primer, serta memberikan kerangka fakta empiris yang objektif mengenai kinerja elektoral dan konteks sosiografis wilayah penelitian. Dengan menggabungkan kedua jenis data ini, penelitian ini dapat melakukan triangulasi sumber yang memperkaya analisis dan meningkatkan validitas temuan secara keseluruhan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data utama yang saling melengkapi, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan studi dokumentasi.

1. Wawancara mendalam dipilih sebagai teknik utama untuk menggali informasi kualitatif yang mendalam, bersifat kontekstual, dan mengandung nuansa subjektif dari para aktor yang terlibat langsung dalam proses politik yang dikaji. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan panduan pertanyaan yang fleksibel, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi respons informan secara lebih terbuka, sekaligus mengonfirmasi atau mendalami hal-hal yang muncul selama percakapan. Proses wawancara direkam dengan izin informan dan dicatat secara mendetail untuk menjaga keakuratan data. Informan dipilih secara purposif, meliputi pengurus partai, anggota legislatif, penyelenggara pemilu, aktivis partai, dan masyarakat pemilih, guna mendapatkan perspektif yang komprehensif dan berimbang.
2. Studi dokumentasi digunakan sebagai teknik pendukung untuk mengumpulkan data sekunder yang bersifat faktual, tertulis, dan terverifikasi. Dokumen yang dikumpulkan mencakup bahan-bahan resmi seperti hasil rekapitulasi suara dan dokumen pemilu dari KPU Kabupaten Pinrang, dokumen internal partai (misalnya AD/ART, program kerja, atau laporan kegiatan), publikasi media (berita daring, siaran pers, majalah partai), serta konten digital dari media sosial resmi Partai NasDem. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk melacak konsistensi narasi, memverifikasi klaim, dan memahami konteks kebijakan atau kampanye partai dalam kurun waktu tertentu. Dengan menggabungkan wawancara dan studi dokumentasi, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber data, yang berfungsi untuk meningkatkan validitas, reliabilitas, dan kedalaman analisis secara keseluruhan.

2.5. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan seseorang yang benar-benar mengetahui suatu atau persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya. Dalam hal ini peneliti akan memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang dikaji serta mampu

memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data (Zellatifanny, 2018).

Adapun informan yang akan terlibat dalam penelitian ini yaitu:

Tabel.2.1 Informan Penelitian

No.	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Ketua/Sekretaris DPD Partai Nasdem Kab.Pinrang	1
2.	Anggota DPRD Kab.Pinrang dari Partai NasDem: 1. Andry Muliadi, S.Sos 2. H.Nasrun Paturusi 3. Muhammad Ilman Alimuddin	3
3.	Ketua KPU Kab.Pinrang 1. Muh.Ali Jodding	1
4.	Masyarakat Pemilih 1. Kaharuddin 2. Andi Irwan,S.M	2
5.	Tim NasDem Milenial 1. Warham	1
	Jumlah	8

2.6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini mengikuti model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014), yang terdiri dari tiga tahapan utama yang saling terkait: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (conclusion drawing/verification). Model ini dipilih karena sifatnya yang sistematis, iteratif, dan memungkinkan peneliti untuk mengelola serta menafsirkan data kualitatif yang kompleks secara komprehensif.

1. Reduksi Data (Data Reduction) Pada tahap ini, data mentah yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen diseleksi, difokuskan, disederhanakan, dan ditransformasikan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga penyusunan laporan akhir. Reduksi dilakukan melalui proses koding tematik (thematic coding) untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan memberi label pada data sesuai dengan tema dan kategori yang muncul dan relevan dengan fokus penelitian, seperti strategi ofensif, defensif, dan keempat dimensi institusionalisasi partai. Data yang tidak relevan atau berulang disaring untuk mendapatkan inti informasi yang paling bermakna dan mendalam.
2. Reduksi Data (Data Reduction) Pada tahap ini, data mentah yang

diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen diseleksi, difokuskan, disederhanakan, dan ditransformasikan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga penyusunan laporan akhir. Reduksi dilakukan melalui proses koding tematik (*thematic coding*) untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan memberi label pada data sesuai dengan tema dan kategori yang muncul dan relevan dengan fokus penelitian, seperti strategi ofensif, defensif, dan keempat dimensi institusionalisasi partai. Data yang tidak relevan atau berulang disaring untuk mendapatkan inti informasi yang paling bermakna dan mendalam.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*) Berdasarkan penyajian data, peneliti mulai menarik makna dan merumuskan kesimpulan awal. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi secara ketat melalui teknik triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber (pengurus partai, penyelenggara pemilu, aktivis, dan pemilih). Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan mengonfirmasi temuan dari wawancara dengan bukti-bukti dokumen tertulis atau rekaman media. Proses verifikasi yang berulang ini memastikan bahwa temuan dan kesimpulan yang dihasilkan bersifat kredibel, konsisten, valid, dan didukung oleh bukti empiris yang kuat. Dengan mengikuti kerangka analisis interaktif ini, penelitian ini tidak hanya berhenti pada deskripsi fenomena, tetapi bertujuan untuk menghasilkan temuan yang bersifat interpretatif dan analitis, sehingga mampu mengungkap kompleksitas dan dinamika strategi politik Partai NasDem dalam konteks elektoral Kabupaten Pinrang secara mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan.